

Perdebatan Teori Rasionalitas dalam Menjelaskan Terbentuknya Biaya  
Transaksi pada Seleksi Pegawai Negeri  
*The Debate of Rationality Theory in Explaining the Formation of Illegal  
Cost of Transaction* ☆

M. Firmansyah<sup>a,\*</sup>, Agus Suman<sup>b,\*\*</sup>, Asfi Manzilati<sup>b</sup>, Susilo<sup>b</sup>

<sup>a</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Mataram

<sup>b</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya

---

## Abstract

A civil servant selection attributes transaction cost. Aim of this conceptual paper is to explain behavior of transaction cost payment from perspective theory of the rationale of economics. This study was conducted by understanding various theories regarding a phenomena of transaction cost payment. This study revealed transaction cost payment as typical self interest and utility maximization (neo-classic rationality), to behave as *Al-Nafs Al-Ammarah* (Islamic rationality). The transaction cost payment was encouraged by perception, understanding and prior experiences (Keynes rationality), environment (psychology rationality). However, there was a limited scope of information for transaction cost payment (bounded rationality).

**Keywords:** Rationality Theory, Transaction Costs, Civil Service Applicants

## Abstrak

Seleksi pegawai negeri sering kali memunculkan biaya transaksi. Tujuan dari artikel konseptual ini adalah menjelaskan perilaku membayar biaya transaksi tersebut dalam perspektif teori rasionalitas ilmu ekonomi. Studi dilakukan dengan memaknai berbagai perdebatan teori rasionalitas dan menghubungkannya dengan fenomena membayar biaya transaksi. Hasil studi menunjukkan membayar biaya transaksi sebagai bentuk *self interest* dan maksimalisasi utilitas (rasionalitas neo-klasik), sebagai perilaku *Al-Nafs Al-Ammarah* (rasionalitas Islam). Membayar biaya transaksi juga dibentuk oleh persepsi, pemahaman, dan pengalaman perilaku sebelumnya (rasionalitas Keynes), lingkungan (rasionalitas sosiologi), dan kepribadian (rasionalitas psikologis). Di samping itu, terdapat keterbatasan informasi dalam membayar biaya transaksi tersebut (*bounded rationality*).

**Kata kunci:** Teori Rasionalitas, Biaya Transaksi, Seleksi Pegawai Negeri Sipil

**JEL classifications:** A12, A14, D82

---

## Pendahuluan

Perkembangan teori rasionalitas saat ini tidak lagi mengenal batasan ilmu. Ekonomi, psikologi, biologi hewan, antropologi, dan juga filsafat masing-masing mengembangkan model, simpulan dan pengambilan keputusan berbasis rasionalitas (Gigerenzer dan Selten, 2001). Bagi ilmu ekonomi, rasionalitas dapat dianggap

---

☆ Penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. Munawar, PhD, Prof. Chandra F. Ananda, PhD dan Arief Hoetoro, PhD atas saran dan diskusi yang membangun sehingga artikel ini dapat diselesaikan.

\*Alamat Korespondensi: Jl. Majapahit No. 62 Telp. (0370) 631935. Mataram 83125. Hp. 082131476810. E-mail: [firman\\_mtr@yahoo.com](mailto:firman_mtr@yahoo.com).

\*\*Alamat Korespondensi: Jl. Mayjen Haryono 165 Malang. Telp. (0341) 562154, 551396, 553834. Faks. (0341) 556701.

sebagai bangunan dasar, fondasi, atau inti dari paradigma ilmu ekonomi modern (Gerrard, 1993; Vanberg, 2004), sehingga seperti halnya bangunan rumah yang memiliki fondasi, ketika pemahaman rasionalitas itu runtuh, maka runtuh pula teori-teori "rumah" dari ilmu ekonomi modern itu.

Ilmu ekonomi mendeskripsikan perilaku rasional dalam *neo-classical maximization* atau teori pilihan rasional (Redmond, 2004). Menurut teori ini, manusia digambarkan sebagai makhluk yang sepenuhnya berperilaku dan memilih secara rasional, yang mengedepankan *self interest* dan karakteristik memaksimalkan kepuasan (Graafland, 2007; Landa dan Wang, 2001; Kyriacou, 2005). Hal yang sama diungkapkan Jeremy Bentham bahwa manusia cenderung menghindari rasa sakit dan menyukai kesenangan (Hoetoro, 2007).

Dari gagasan manusia rasional lahir beberapa pemodelan ekonomi, misalnya model peramalan rasional (*rational expectation*) yang dikembangkan Robert Lucas atau teori permainan (*game theory*) oleh John F. Nash. Di samping itu, gagasan rasionalitas juga menjadi fondasi pemikiran ekonomi klasik, yaitu pada ranah mikroekonomi misalnya konsep *marginal utility* dan *marginal rate of substitution* yang dikenal dalam teori mikroekonomi.

Becker dan Murphy mengasumsikan manusia selalu melihat ke depan dan selalu memutuskan secara rasional (Vale, 2010). Keputusan rasional ini didasarkan pada kalkulasi manfaat-biaya, artinya setiap pilihan yang memiliki manfaat lebih besar dari biaya, maka dianggap rasional, demikian pula sebaliknya.

Ketika manusia dianggap selalu berperilaku rasional, muncul pertanyaan bagaimana dengan perilaku kejahatan, kecurangan, korupsi, kolusi, pengedar narkoba, dan pelanggaran hukum lainnya. Bukankah perilaku-perilaku itu selalu dibayang-bayangi penjara, bahkan tidak jarang pelaku harus merengang nyawa akibat ditembak aparat? Jika demikian, dalam konsep rasionalitas terbuka ruang perdebatan kembang-

li terkait alasan dibalik setiap perilaku, bahwa benarkah pelaku selalu didasari oleh *self interest* dan maksimalisasi utilitas berdasarkan manfaat dan biaya. Hal ini untuk menjawab pertanyaan apabila setiap individu rasional kenapa pelanggaran hukum tetap terjadi.

Konteks membayar biaya transaksi ilegal pada seleksi pegawai negeri sipil jika dihubungkan dengan pemikiran rasionalitas adalah fenomena yang menarik. Menurut Menteri Pendeayagunaan Aparatur Negara, biaya calo<sup>1</sup> untuk masuk menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS)<sup>2</sup> disinyalir berkisar antara Rp60 juta sampai dengan Rp100 juta. Jika saja setiap tahun 1.500 orang diterima, maka uang yang berputar sekitar Rp150 miliar (*Kompas.com*, 2012). Seorang calo yang rasional tentunya sudah memikirkan resiko hukuman penjara, tetapi walaupun sudah ada calo-calo yang mendapatkan hukuman penjara, tidak menyurutkan calo-calo lain untuk melakukan transaksi ilegal ini.

Bagi pelamar CPNS, ia mendapat resiko bahwa ia dapat saja kehilangan uang karena ditipu oleh calo. Tetapi hampir setiap tahun tetap ada indikasi calo-calo ini tetap dipercaya oleh pelamar CPNS. Di Pekanbaru, empat orang telah ditipu oleh calo CPNS, dengan kerugian Rp155 Juta (*Tribun Jateng*, 2011). Kasus penipuan CPNS di Surabaya membuahkan hukuman 40 bulan penjara (*Tribun Medan*, 2012). Selain kasus ini, masih banyak lagi kasus penipuan CPNS lain yang terungkap. Informasi penyogokan CPNS selalu hangat diperbincangkan publik, sehingga jika dilakukan pencarian di mesin pencari *google.com* dengan kata kunci "sogok CPNS" maka terdapat sekitar 66 ribu lebih hasil pembahasan di dalam-

<sup>1</sup>Calo adalah perantara yang dianggap dapat memperlancar proses transaksi.

<sup>2</sup>Penerimaan PNS dimulai dari seleksi CPNS. Setelah seseorang menjadi CPNS, ia akan melewati beberapa tahap seperti misalkan *training* pra-jabatan untuk akhirnya resmi menjadi PNS. Jika sudah masuk menjadi CPNS, hampir dipastikan seseorang menjadi PNS jika sudah melewati proses yang telah ditetapkan.

nya.

Dengan terungkapnya berbagai kasus penipuan itu, pertanyaannya adalah mengapa seseorang masih saja mau mempraktikkan transaksi ilegal ini dan bagaimana konsep rasionalitas menjelaskan perilaku tersebut. Hal inilah yang akan menjadi topik bahasan dalam artikel ini.

## Tinjauan Referensi

### Dasar Pemikiran Rasionalitas

Tujuan yang ingin diraih oleh setiap individu berbeda antar individu dan bisa bervariasi antar waktu. Kegiatan individu dalam mengejar tujuannya ini dilandasi oleh nilai yang mendasar. Nilai tersebut bersifat *fundamental*, terbangun dalam diri individu, menjadi motivasi yang kuat dalam mengejar tujuannya dan memberikan pengaruh kuat dalam tindakannya sehari-hari (Kasper dan Streit, 1998).

Nilai *fundamental* yang dianggap sebagai ciri *good society* dirangkum Kasper dan Streit (1998) sebagai berikut, yaitu: *Pertama*, individu menginginkan kebebasan dari rasa takut dan keterpaksaan, yang direfleksikan dari kebebasan sipil dan ekonomi. *Kedua*, keadilan, yang memosisikan manusia dalam kedudukan yang sama, sehingga seharusnya diperlakukan sama. *Ketiga*, keamanan (*security*) di mana orang berharap selalu merasa nyaman dalam kehidupannya dan bebas memilih untuk masa depannya, tanpa pengalaman kekerasan yang menghantui. *Keempat*, damai, artinya tidak adanya perselisihan dan kekerasan yang ditimbulkan oleh agen yang kuat, baik dalam komunitasnya (*internal peace*) maupun di luar lingkungannya (*external peace*). *Kelima*, kesejahteraan ekonomi terkait aspirasi untuk perbaikan material kehidupan sekarang dan masa depan. *Keenam*, kehidupan yang alamiah, tercipta dari kejujuran dan nilai-nilai yang menjadi cita-cita kebanyakan orang.

Nilai-nilai tersebut umumnya merupakan bentuk rasionalitas mendasar dan hakiki dari setiap tindakan manusia, dimana setiap in-

dividu diasumsikan akan berusaha mencapainya. Manusia bertujuan menggapai kesenangan, kebahagiaan, dan kenyamanan, baik dalam kehidupan sekarang maupun masa depan. Perdebatannya kemudian adalah bagaimana mengukur kebahagiaan, kesenangan, atau kenyamanan itu. Neo-klasik cenderung mengukurnya dari jumlah materi yang diperoleh, dengan mengabaikan kelembagaan berupa tata aturan dan nilai-nilai dalam masyarakat. Karena menyangkut materi, maka ia akan selalu terkait untung dan rugi, dengan demikian setiap tindakan harus didasarkan pada perhitungan manfaat dan biaya dalam rangka memaksimalkan kepuasannya. Dengan demikian, teori pilihan rasional yang disebut juga sebagai teori tindakan rasional (*rational action*) yang merupakan kerangka dasar dalam pemodelan ilmu ekonomi. Pilihan rasional juga mempunyai makna lebih banyak lebih baik daripada sedikit (*more is better*).

Teori pilihan rasional secara luas dianalisis dalam teori perilaku manusia (*human behavior*), di mana bagi Gilboa (2010) pilihan rasional merupakan dikotomi antara kelayakan dan keinginan. Ketika seorang menganggap dirinya layak akan sesuatu dan punya keinginan untuk memilikinya, maka tindakan tersebut merupakan tindakan rasional. Di samping itu, Gilboa menganggap perilaku rasional terjadi bila orang merasa nyaman dan tidak malu untuk melakukan aktivitasnya. Tindakan rasional terjadi jika individu mempunyai keinginan terhadap sesuatu sekaligus mempunyai kemampuan untuk mencapai keinginan tersebut. Ketika seorang individu mempunyai kemampuan mewujudkan keinginannya, maka ia tidak akan merasa malu dan cemas, sebaliknya akan merasa nyaman untuk melakukannya. Pendekatan individualis ini berbeda dari pendekatan lain yang akan dibahas dalam bagian selanjutnya.

Prinsip dasar '*homo economicus*' memberikan pemahaman bahwa manusia selalu berperilaku rasional dengan melakukan kalkulasi manfaat dan biaya dalam setiap tindakannya.

Perilaku rasional dianggap sebagai *'engine of truth'* dalam membantu menemukan teori atau hukum ekonomi (Salehnejad, 2007). Teori pilihan rasional yang menyangkut kepentingan pribadi (*self interest*) yang dapat direpresentasikan melalui contoh: bagi produsen, untung lebih banyak lebih baik daripada sedikit; bagi konsumen, dapat membeli lebih banyak lebih baik dari pada lebih sedikit. Pilihan rasional menekankan pada kepuasan yang didapat oleh individu dalam setiap tindakannya. Menjadi rasional berarti bertindak secara konsisten dan instrumental untuk mencapai suatu tujuan yang telah didefinisikan dengan baik, sebaliknya perilaku tidak rasional adalah perilaku yang sia-sia (Foley, 2004).

### Perdebatan Konsep Rasionalitas

Setelah memahami dasar teori pilihan rasional yang umum dipahami ilmu ekonomi, selanjutnya akan didiskusikan berbagai pemikiran rasional yang berkembang setelahnya karena teori pilihan rasional dalam ilmu ekonomi masih menjadi perdebatan panjang (Wartiovaara, 2011). Perdebatan yang terjadi mencakup pemikiran dasar neo-klasik yang mengedepankan rasionalitas, di mana manusia diasumsikan selalu bertindak rasional, menjadi makhluk ekonomi yang mengetahui segalanya, melakukan transaksi tanpa biaya (*zero transaction cost*) dengan mengabaikan kelembagaan (Landa dan Wang, 2001). Pemikiran neo-klasik menganggap individu adalah berdaulat, dan perilakunya akan selalu memaksimalkan kepuasan dengan kendala anggaran yang dimiliki (Folmer, 2009). Karena itu tindakannya selalu mempertimbangkan manfaat dan biaya dari setiap alternatif tindakannya. Perilaku rasional dianalogikan sebagai karakteristik dari *'homo economicus'* (Landa dan Wang, 2001).

Logika ini melahirkan berbagai pemodelan ekonomi yang berbasiskan statistika dan matematika, yang serba pasti dan tanpa menyentuh sifat sosial dalam diri manusia yang dimodelkan itu, berupa *'homo sociologicus'*, dimana

manusia memiliki lingkungan dan perilakunya dibentuk dari berbagai interaksi antara diri dan lingkungan. Asumsi yang ada dibalik pemodelan ekonomi ini adalah bahwa individu selalu akan memaksimalkan utilitasnya.

Sebagai pengkritik utama eksistensi ekonomi klasik secara umum, Keynes memiliki garis pemikiran unik terkait rasionalitas, bahwa rasionalitas terbentuk dari apa yang disebutnya sebagai *direct acquaintance* atau pengenalan langsung terhadap objek perilaku, yang terdiri dari tiga komponen: pengalaman (*experience*), pemahaman (*understanding*), dan persepsi (*perception*) (Wislow, 1993). Perilaku individu dipengaruhi oleh pengalaman yang diperolehnya, dipelajarinya, dan kemudian digunakan untuk sesuatu yang dikerjakan saat ini. Pengalaman membentuk memori yang menjadi pedoman dalam berperilaku, sebagai guru terbaik yang menuntun tindakan individu. Pengalaman menjadikan tindakannya tidak salah atau keliru untuk kedua kalinya.

Memahami apa yang dikerjakan juga penting bagi Keynes sebagai pembentuk rasionalitas. Orang rasional tidak mungkin berperilaku dari sesuatu yang tidak dipahaminya. Jika tetap dilakukannya, maka tindakan itu tidaklah rasional. Bagi Keynes, persepsi juga menjadi pembentuk rasionalitas, dimana dapat terjadi orang atau sekelompok orang mempunyai perilaku yang berbeda tetapi dipicu oleh persepsi yang belum tentu berbeda walaupun menghasilkan tindakan yang sama. Dengan demikian, penyebab perbedaan perilaku dari individu adalah persepsi mereka akan tindakan mereka masing-masing.

Persepsi dapat berupa manfaat perilaku itu untuk diri dan lingkungannya, serta konsekuensi yang akan diperoleh dari tindakannya itu. Jika orang memersepsikan baik, maka baik pula dianggap perilakunya. Ketiga komponen ini menurut Keynes membentuk pengetahuan dalam diri individu, sehingga rasionalitas dari setiap individu akan berbeda-beda, tergantung dari pengetahuannya, artinya rasional bagi sa-

tu individu belum tentu bagi individu lainnya (Wislow, 1993).

Keynes mencontohkan perilaku investor akan investasi yang dilakukannya. Apa yang diinvestasikan bukan dipengaruhi oleh sesuatu yang pasti, yang berupa keuntungan dan kerugian yang nyata (riil). Namun, keputusan investasi adalah hasil persepsi investor yang didasarkan berbagai pengetahuan yang diperolehnya akan investasi tersebut. Keynes menulis (Wislow, 1993):

*Investor will be affected, as is obvious, not by the net income which he will actually receive from his investment in the long run, but by his expectations. These will often depend upon fashion, upon advertisement, or upon purely irrational waves of optimism or depression. Similarly by risk we must mean, not the real risk as measured by the actual average of the class of investment over the period of years to which the expectation refers, but the risk as it is estimated, wisely or foolishly, by the investor*

Dari pemikirannya ini, Keynes membenarkan konsep probabilitas sebagai sesuatu yang logis, dalam arti probabilitas akan keuntungan atau kerugian akan menentukan tindakan seseorang sekarang. Karena itu dapat dikatakan ekspektasi seseorang memengaruhi perilaku saat ini. Ekspektasi tersebut dapat diperkaya oleh pengenalan langsung (*direct acquaintance*) yang bersumber dari pengalaman, pemahaman, dan persepsi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengenalan langsung memberikan dasar yang rasional dan objektif akan suatu keyakinan. Pengenalan langsung disebut sebagai empirisme, di mana empirisme mengacu pada penafsiran tertentu dari pengalaman, sehingga dapat dikatakan pengalaman memberikan landasan utama akan keyakinan.

Pemahaman Keynes dapat dikatakan realistik untuk menjelaskan kondisi saat ini. Ia mengakui bahwa perilaku individu tidak mungkin

memiliki kesamaan, katakanlah sama-sama meraih kepuasan pada aktivitas yang sama karena setiap perilaku akan tergantung dari sejauh mana orang memahami dan memperoleh manfaat dari perilakunya itu. Misalnya, ketika di pasar dijual alat berteknologi canggih, tidak mungkin semua orang menginginkan alat itu untuk dibeli, karena masing-masing mempunyai kebutuhan yang berbeda untuk menjadi prioritas perilakunya. Kalaupun membeli alat yang sama, boleh jadi masing-masing individu memiliki kebutuhan berbeda akan alat-alat itu.

Walaupun tindakan individu sama tujuannya, belum tentu hal ini didasarkan pada pengetahuan atau pengalaman yang sama. Karena itu seberapa besar keseriusan atau keberhasilan dari tindakan itu akan tergantung dari pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki masing-masing individu. Sebagai contoh, seorang dalam menempuh ujian sekolah melakukan aktifitas yang sama namun kesuksesan dalam menjawab soal-soal ujian dapat berbeda tergantung dari seberapa besar pengalaman atau pengetahuan dari masing-masing peserta ujian.

Pengkritik konsep rasionalitas dari arus pemikiran ekonomi yang lain menganggap bahwa perilaku rasional individu adalah mencoba melakukan apa yang terbaik untuk dilakukan (Hey, 1993) dan bukan mendapatkan hasil yang maksimal. Setiap orang tentu berharap yang terbaik, tidak saja berarti manfaat yang terukur, tapi juga mengakomodasi nilai-nilai atau budaya yang berkembang dalam lingkungannya.

Berharap untuk mendapatkan yang terbaik dapat bermakna mendapatkan kebahagiaan, walaupun pada pemikiran ini diasumsikan kebahagiaan bukan hanya untuk pribadi, tetapi mengakomodasi kebahagiaan keluarga dan masyarakat atau lingkungannya. Orang akan merasa bahagia ketika lingkungannya mengakui kelebihan dari tindakan individu dalam komunitasnya. Ketika masyarakat menganggap bahwa pegawai negeri lebih baik dari wiraswasta,

maka dengan meraih status itu kepuasan individu akan memuncak.

Dalam konteks ini, kebahagiaan, kesenangan, dan kenyamanan cenderung bersifat abstrak, sulit dihitung atau dikalkulasi secara ekonomis. Kepuasan batin atau kenyamanan dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai agama, keyakinan, atau hubungan sosial yang menggiring individu berperilaku menggapai kepuasannya. Ketika seseorang memberi sumbangan kepada orang miskin, tentu sulit bagi si pelaku berharap balasan material dari orang miskin tersebut, atau ketika seorang dermawan membangun sekolah gratis untuk orang miskin dimana tidak ada keuntungan materi yang diperoleh dari perilaku tersebut. Kesadaran sebagai makhluk sosial membuatnya mendapatkan kebahagiaan dan kepuasan dari membantu sesama, menghilangkan kesusahan orang lain, menjalankan perintah agama dimana semua itu di luar perhitungan manfaat dan biaya secara materiil.

Thorstein Veblen dan murid-muridnya (Mitchell, Commons dan Ayres) yang dianggap sebagai pemikir ekonomi kelembagaan lama (*old institutional economics*) menganggap bahwa rasionalitas terbentuk dari kebiasaan (*habits*) dan rutinitas (*routines*). Kebiasaan dan rutinitas dapat membuat seseorang berperilaku tanpa melakukan kalkulasi manfaat dan biaya, atau dapat dikatakan perilaku kalkulasi digantikan kebiasaan dan rutinitas. Ketika masyarakat dalam suatu lingkungan terbiasa melakukan gotong royong, maka tidak ada imbalan yang diharapkan dari individu ketika melakukan itu. Itulah rutinitas mereka dan keseharian hidup dalam lingkungan.

Dalam berpartisipasi di masyarakat, individu tidak perlu melakukan kalkulasi untung-rugi. Hal ini karena kebiasaan gotong royong sudah menjadi kebiasaan dan rutinitas bagi diri dan lingkungannya. Perdebatan akan teori rasionalitas muncul dalam ranah ekonomi kelembagaan menyangkut kebiasaan buruk yang mulai menjangkiti individu dalam suatu ma-

sarakat, misalnya karena pengaruh tontonan yang memasukkan nilai-nilai global dan semakin ketatnya persaingan hidup yang membuat seseorang menjadi individualis membuat nilai kejujuran dan nilai budaya menjadi berubah.

Kebiasaan bukanlah sesuatu yang statis tapi dinamis, demikian pula rutinitas. Bila mengacu pada pemikiran ini, dapat dikatakan bahwa jika terjadi perubahan rutinitas dan kebiasaan, maka akan berubah pula rasionalitas seorang dalam berperilaku.

Pemikiran ekonomi kelembagaan lama menganggap bahwa kebiasaan dan rutinitas mempunyai kaitan dengan perubahan kelembagaan (*institutional change*) dan perumusan penyebab kumulatif Darwin<sup>3</sup>. Konsep ini terkait kebiasaan berpikir yang dianggap sebagai induksi manusia oleh keadaan materiil, pengalaman turun-temurun, pekerjaan turun-temurun, tradisi, pendidikan, iklim, dan lingkungan.

Veblen mendefinisikan kelembagaan sebagai hasil dari kebiasaan berpikir manusia. Ia menganggap kebiasaan berpikir menjadi pengganti rasionalitas hedonistik dari marginalisme<sup>4</sup>, dan rasionalitas skema konflik kelas ala *Marx*. Veblen berpendapat bahwa: "*knowledge has always been the main productive economic asset*" (Gagnon, 2007). Tindakan manusia dipandu oleh kebiasaan dan kepentingan, sebagai bahan pemikiran yang dianggap sebagai hasil respons terhadap rangsangan. Melalui konsep ini, Veblen mampu mengatasi satu dari apa yang

<sup>3</sup>Pemikiran Veblen banyak dipengaruhi teori evolusi Darwin, sehingga Veblen disebut sebagai Darwinian. Jika evolusi Darwin adalah menyangkut perubahan atau perkembangan makhluk hidup, maka Veblen menganggap terjadi evolusi, perkembangan pikiran manusia.

<sup>4</sup>Marginalisme adalah sebuah paham, metode yang mulai diterapkan sekitar tahun 1870-an, menjadi sentral pemikiran neo-klasik ekonomi. Dasar pikir utama marginalis adalah setiap perubahan kenaikan satu variabel akan diikuti perubahan variabel lain, misalnya perubahan total biaya dibandingkan dengan perubahan pendapatan. Diasumsikan terjadi pergerakan otomatis menuju keseimbangan (*equilibrium*) dan mengabaikan faktor kelembagaan (Rutherford, 1995).

dia anggap sebagai kekurangan *Marrisme* dan *histories school*, dengan mengidentifikasi berbagai mekanisme kelembagaan dalam memengaruhi preferensi dan selera. Selera memengaruhi motif ekonomi dan pilihan faktor ekonomi seseorang, sehingga peran selera tidak bisa dipandang sebelah mata dalam analisis. Veblen tidak menyetujui perilaku hedonistik ekonomi ortodoks, dengan memberikan pernyataan bahwa ilmu ekonomi sebagai "kalkulator kilat kesenangan dan kesengsaraan". Dua hal yang ditentang Veblen adalah *pertama*, gagasan bahwa manusia memiliki rasionalitas yang memberikan solusi instan yang optimal dalam setiap kasus yang dihadapinya; *kedua*, orang hanya bereaksi terhadap sebuah fungsi utilitasnya. Veblen lebih menekankan kepada peran aktif manusia yang terbentuk dari kebiasaan. Seperti ungkapnya berikut (Rutherford, 1994):

"Ini adalah karakteristik manusia untuk melakukan sesuatu, tidak hanya untuk menderita dan memperoleh kesenangan dari kemampuan yang sesuai. Dia bukan hanya seikat keinginan yang akan jenuh dengan ditempatkan di jalur kekuatan lingkungan, melainkan struktur koheren kecenderungan dan kebiasaan yang mencari realisasi dan eksperimen selama kegiatan berlangsung"

Terkait rasionalitas ini, Commons sebagai murid Veblen menolak gagasan maksimalisasi, dan ia berpendapat bahwa orang mengembangkan satu set 'asumsi kebiasaan' yang memberikan dasar pada transaksi rutin. Kuncinya adalah membuat asumsi kebiasaan rutinitas sehari-hari yang memungkinkan untuk dilakukan tanpa berpikir dan memberikan perhatian konstan. Commons mencontohkan ketika pekerja baru masuk pabrik atau lahan pertanian, atau ketika seorang pemula dalam profesi dan bisnis, semuanya akan mendapat hal baru yang tidak terduga, karena sebelumnya tidak ditemukan dari pengalamannya, maka lama kelamaan dia akan belajar, akhirnya menjadi akrab

dengan pekerjaannya dan menjadi rutin karenanya. Karena itu kebiasaan dan rutinitas adalah penting, dan kebiasaan tidak menafikan penilaian cerdas atau rasional tetapi memberikan suatu peran tertentu, sebagai "transaksi strategis kegiatan intelektual" sehingga jika kehidupan harus terus berubah, maka intelektual harus hidup untuk mengontrol strategi, namun bila antara intelektual dan kebiasaan bisa berjalan bersama, maka asumsi kebiasaan adalah cukup (Rutherford, 1994).

Jika demikian, dapat dianggap bahwa aturan kolektif adalah sebagai pembentuk rasionalitas perilaku atau pembatas rasionalitas individu. Pertanyaan ini membutuhkan jawaban di lapangan, dimana hal ini tergantung dari bagaimana rasionalitas itu terbentuk. Artinya, bila aturan kolektif itu ada maka seharusnya dapat terbangun perilaku yang bersumber dari aturan kolektif atau kelembagaan tersebut. Sebab menurut Schmid (2004) individu mengkreasi institusi; selanjutnya institusi akan memengaruhi perilaku individu; kemudian aksi individu akan memodifikasi kembali institusi, baik formal maupun non-formal.

Pertanyaannya, bila individu dapat membentuk institusi (aturan main) dan perilaku individu akan dipengaruhi oleh aturan main tersebut, maka bagaimana jika perilaku itu adalah perilaku menyimpang (misalnya: penyogokan), dan bagaimana dengan aturan main yang juga merupakan aksi kolektif, apakah aturan main yang telah berubah atau individu yang menunjukkan perilaku pembangkangan terhadap aturan main? Jawabannya dapat ditemukan di lapangan. Mitchell sebagai murid lain dari Veblen mempunyai pandangan lain walaupun garis pikiran Veblen sangat memengaruhi pola pikir Mitchell. Seperti Veblen, Mitchell menganggap dirinya sebagai bagian dari tradisi evolusi ekonomi. Pandangan Mitchell yang dikutip oleh Milonakis dan Fine (2003) sebagai berikut:

"Orang yang diciptakan oleh imajinasi para ekonom memang memiliki

karakter tipis dan formal dibandingkan dengan pewaris mereka dari segala usia, dengan warisan yang kaya ras naluri, mewarisi konsep sosial, dan kekayaan kebiasaan. Rasionalitasnya mendapatkan karakter dari lembaga-lembaga di mana ia dibesarkan”

Diabaikannya sisi kemanusiaan secara konsisten oleh ekonom arus utama telah dijadikan senjata oleh ekonom kelembagaan untuk menyatakan bahwa peran penting manusia dan tata aturannya telah diabaikan. Pada awalnya ilmu ekonomi adalah ilmu perilaku manusia (*human behavior*), sehingga fokus ilmu ekonomi seharusnya mengamati lebih jauh apa yang disebut oleh Mitchell sebagai konsep sosial (*social concept*). Konsep sosial ini menjadi inti dari kelembagaan sosial. Konsep sosial dan kelembagaan tercermin dalam aktivitas manusia dan aktivitas ekonomi (Milonakis dan Fine, 2003). Terkait cabang-cabang ilmu ekonomi, Mitchell sependapat dengan Schumpeter yang mengharapkan kerja sama yang erat antara teori ekonomi, sejarah ekonomi, dan ekonomi terapan.

Ide rasionalitas Mitchell terbentuk dari Veblen. Keluhan utama Mitchell adalah asumsi rasionalitas ortodoks yang cenderung mengutamakan unsur rasional (manfaat dan biaya) dalam kehidupan ekonomi. Menurut Mitchell, rasionalitas bukanlah bagian mendasar dari sifat manusia, namun produk yang muncul dari institusi keuangan. Uang melatih orang untuk penggunaan alasan guna merasionalisasi kehidupan ekonominya sehingga penggunaan uang meletakkan dasar bagi teori hidup yang rasional. Sehingga rasional ekonomi diperoleh dari bakat, bukan dasar yang kokoh sebagai konstruksi teoritis.

Ada dua karakteristik penting yang diungkapkan Mitchell; *pertama*, Mitchell menolak gagasan bahwa rasionalitas manfaat dan biaya dilakukan untuk setiap kasus yang dihadapi individu. Ia mengakui bahwa perilaku ekonomi mungkin saja berhubungan dengan kegiatan di mana pemikiran rasional sering kali mun-

cul, namun pikiran rasional di sini tidak berarti setiap kali perilaku baru didasarkan pada kalkulasi baru, tetapi seseorang akan membangun kebiasaan dan rutinitas. *Kedua*, tidak semua bidang kehidupan sama-sama memiliki standar berupa uang dan rasionalitas. Mitchell mencontohkan perilaku konsumsi rumah tangga tidak saja dilihat dari aspek rasionalitas kalkulasi materi, tapi juga dipengaruhi oleh banyak norma sosial seputar kehidupan keluarga; atau dapat juga kurangnya informasi membuat keputusan membeli tidak terkait dengan kesejahteraan keluarga. Kondisi ini menumbangkan proses adaptasi rasional, pada saat yang sama membuat argumen kebiasaan dan rutinitas lebih baik (Rutherford, 1994).

Untuk itu dapat ditarik kesimpulan bahwa pemikiran Veblen dan murid-muridnya sebagai *old institutional economics* menganggap rasionalitas perilaku tergantung dari kebiasaan (*habits*) dan rutinitas (*routines*) dari individu dalam lingkungan atau komunitasnya. Kebiasaan dan rutinitas itulah yang menggantikan perilaku kalkulasi manfaat dan biaya.

Generasi berikutnya dari pemikir ekonomi kelembagaan yang disebut *new institutional economics* (NIE) muncul terkait ulasannya akan rasionalitas. Mereka berpandangan bahwa kebiasaan dan rutinitas atau norma yang termasuk dalam analisis ekonomi kelembagaan dibuat untuk menafsirkan aturan yang konsisten dengan maksimalisasi pilihan rasional. Dari pemahaman ini, kita dapat mengerti bahwa NIE cenderung mengakomodasi pemikiran neo-klasik (yaitu maksimalisasi) dan pemikiran OIE berupa rutinitas, kebiasaan, dan norma-norma. Namun demikian, ada pula mereka yang mengadopsi perspektif evolusi dan menolak argumen tersebut, yaitu generasi yang dibahas sebelumnya, OIE. Bila Veblen mengatakan manusia sebagai binatang sosial, Heyek (1973) dalam Rutherford (1994) menganggap manusia sebagai ”binatang yang banyak aturan dengan satu tujuan”.

Ada empat hal penting yang menjadi fon-

dasi NIE (Rutherford, 1994) yaitu: *pertama*, biaya informasi dan pengambilan keputusan; *kedua*, kendala kognitif dan pemrosesan informasi; *ketiga*, risiko membuat kesalahan dalam usahanya untuk menyesuaikan kasus demi kasus; dan *keempat*, keuntungan individu dengan fakta bahwa perilakunya ditentukan oleh aturan. Dari keempat aturan di atas diterapkan pada kebiasaan, rutinitas, aturan perilaku pribadi dan aturan sosial, serta norma-norma. Kritik utama NIE terhadap maksimalisasi didasarkan pada biaya informasi dan pengambilan keputusan yang disebut *bounded rationality* (rasionalitas terbatas).

### ***Bounded Rationality: Jembatan Neo-Klasik dan Institutional Economics***

Pada tahun 1957, teori pilihan rasional tradisional dikritik oleh Herbert Simon dengan model yang disebut sebagai teori *Bounded Rationality of Satisficing* yang bertentangan dengan maksimalisasi perilaku aktor, di mana aktor dianggap memiliki hambatan yaitu berupa keterbatasan kognitif dan struktur lingkungan (Landa dan Wang, 2001). Model ini oleh Simon diilustrasikan sebagai sepasang gunting yang memiliki dua mata pisau, satu pisau sebagai keterbatasan kognitif dan pisau lain sebagai struktur lingkungan.

Dengan demikian, rasionalitas terbatas adalah gagasan bahwa dalam pengambilan keputusan, rasionalitas individu dibatasi oleh informasi yang dimiliki, keterbatasan kognitif dari pikiran atau keterbatasan waktu, sementara adakalanya keputusan harus segera diputuskan. Di samping itu, pengambil keputusan tidak memiliki kemampuan dan sumber daya memadai untuk sampai pada solusi optimal, karena itu mereka menerapkan rasionalitas setelah penyederhanaan pilihan yang tersedia. Oleh karenanya manusia lebih cenderung menjadi *satisficer* (terpuaskan) ketimbang optimalisasi atau maksimalisasi.

Pengambilan keputusan merupakan proses pencarian, dipandu oleh tingkat aspirasi yang

merupakan nilai dari variabel tujuan yang dicapai atau dilampaui oleh keputusan alternatif yang memuaskan. Alternatif keputusan bukanlah sesuatu yang *given*, tetapi ditemukan. Proses pencarian dilakukan sampai alternatif memuaskan (*satisficing*) ditemukan. Selten (2002) menganggap *satisficing* bukanlah esensi dari rasionalitas Simon, namun merupakan tingkat aspirasi yang tidak permanen (*adaptif aspiration*) yang dinamis sesuai dengan situasi yang berkembang. Fitur dari rasionalitas Simon adalah 'mencari alternatif, *satisficing*, dan aspirasi adaptif' (Selten, 2002).

Dengan demikian, dapat dipahami peran pemikiran Simon dalam menjembatani neo-klasik yang cenderung bebas nilai dan pemikir ekonomi kelembagaan lama yang mengedepankan nilai-nilai atau norma berupa kebiasaan dan rutinitas. Bahwa rasionalitas keputusan harus dicari, tidak *given* (apa adanya), proses pencarian akan dihadapkan dengan berbagai alternatif yang menghasilkan *satisficing*. Hal ini bisa didasarkan pada kalkulasi manfaat dan biaya atau pada nilai-nilai yang berkembang (institusi). Selanjutnya proses itu akan menghasilkan aspirasi adaptif yang terus disesuaikan dengan kondisi pengambilan keputusan.

### **Perpektif Ekonomi Sosiologi**

Rasionalitas dalam ilmu sosiologi merupakan bagian dari memahami perilaku manusia dalam interaksinya dengan lingkungan. Perilaku manusia tidak saja didasarkan atau bersumber pada dirinya sendiri, tapi juga merupakan hasil interaksi dengan lingkungan. Seperti halnya ilmu ekonomi, psikologi, dan yang lain, ilmu sosiologi juga memberi penekanan pembahasan akan topik rasionalitas. Sehingga dengan banyaknya disiplin ilmu yang membahas konsep rasionalitas, ilmu-ilmu sosial semakin kehilangan pembatas terkait tema bahasan antara satu dengan yang lain.

Ilmu statistika dan matematika telah lama berperan dalam ilmu ekonomi lewat pemodelan-pemodelan. Dewasa ini, sosiologi

pun banyak membahas persoalan-persoalan ekonomi. Jika bidang statistika yang digunakan dalam menjelaskan persoalan ekonomi disebut ekonomi statistika atau ekonometrika, maka cabang ilmu sosiologi yang menjelaskan fenomena ekonomi diberi label ekonomi sosiologi, artinya tradisi ekonomi dibahas dengan pendekatan atau cara pandang sosiolog. Tulisan ilmiah terkait topik ekonomi sosiologi misalnya *Principle of Economics Sociology* (Sweberberg, 2003) atau *Reading of Economics Sociology* (Biggart, 2002).

Penjelasan ilmu ekonomi akan persoalan ekonomi seringkali tidak memberikan kepuasan bagi sebagian ekonom dan sosiolog, sehingga mereka mencoba melirik pendekatan lain dalam menjelaskan fenomena ekonomi yang semakin kompleks. Sosiolog begitu bersemangat masuk dalam ranah ekonomi karena sosiolog menilai ilmu ekonomi berbasiskan perilaku manusia yang juga menjadi fondasi dalam sosiologi. Karena sosiologi lebih banyak membahas manusia sebagai makhluk sosial dengan berbagai interaksinya, sehingga sosiolog menilai seharusnya mereka pun dapat memahami motif ekonomi manusia. Di samping itu, pendekatan matematis (ilmu pasti) yang berkembang dalam ilmu ekonomi dewasa ini semakin memudarkan nilai-nilai sosial yang disandang disiplin ekonomi, yang kemudian menuai kritik karena perilaku manusia cenderung unik dan tidak deterministik seperti ilmu pasti.

Lionel Robbins pada tahun 1932 menjadikan ilmu ekonomi sebagai *'the choice science'* yang menganggap bahwa individu memiliki preferensi yang *given*. Sementara dalam sosiologi, Talcot Parsson pada tahun 1937 menjadikan ilmu sosiologi sebagai ilmu struktur sosial norma dan nilai (Hodgson, 2010). Walaupun memiliki jalur bahasan yang berbeda, namun sering kali dirasakan bahwa perilaku ekonomi juga dibentuk dari struktur sosial, norma dan nilai-nilai dalam masyarakat. Karena itu muncul pemahaman bahwa ilmu ekonomi sebenarnya tidak bisa lepas dari sosiologi. Lebih jauh lagi

ada anggapan bahwa penjelasan ilmu sosiologi dalam fenomena ekonomi lebih baik daripada penjelasan dari ilmu ekonomi itu sendiri. Dalam jurnal yang ditulisnya, Folmer (2009) menulis topik yang menantang yaitu *Why Sociology is Better Conditioned to Explain Economic Behaviour than Economics*. Artikel ini mengungkapkan ketidakpuasan terhadap penjelasan ilmu ekonomi akan fenomena yang ada dalam ilmu ekonomi itu sendiri dimana seakan-akan ilmu ekonomi kurang mampu menjelaskan dirinya sendiri.

Termasuk pemahaman rasionalitas, Folmer (2009) menjelaskan bagaimana sosiolog berargumentasi terkait perilaku individu. Tulisan itu berawal dari ketidaksepahaman dengan konsep maksimalisasi oleh agen pada versi neo-klasik. Model rasionalitas itu disebut Lindenberg sebagai RREEMM yang terdiri dari *Resourceful, Restricted, Expecting, Evaluating, Motivated* dan *Meaning* atau kepandaian (akal), kendala, harapan, evaluasi, motivasi dan memaknai (Folmer, 2009). Sejalan dengan itu, Wartiovaara mengutip artikel berjudul *The Nature of Man* karya Jansen dan Meckling yang diterbitkan 1994, di mana artikel ini menginvestigasi beberapa model perilaku manusia secara umum (Wartiovaara, 2011). Model-model itu adalah model REMM (*Resourceful, Evaluative, Maximizing Model*), *The Economics* (atau *money maximization*) *model*, *The Psychologies* (atau *hierarchy of needs*) *model*, *The Sociological* (atau *social victims*) *model* dan *the political* (atau *perfect agent*) *model* (Wartiovaara, 2011).

Menurut Jensen dan Mackling, REMM adalah model terbaik dalam menjelaskan perilaku manusia. REMM ini dapat dirujuk dari beberapa bidang ilmu, yaitu psikologi, sosiologi, politik, dan ekonomi. Dalam ilmu ekonomi, REMM mengasumsikan manusia akan selalu bertindak *recouserfull, self interested, maximizer* tetapi menolak notasi bahwa manusia hanya menyenangi uang atau kekayaan, padahal manusia menyegani hampir segalanya, yaitu kepedulian,

rasa hormat, kekuatan, cinta, atau kesejahteraan orang lain (Wartiovaara, 2011). Dari sinilah dasar pemikiran rasionalitas sosiologi muncul.

### Rasionalitas: Antara Biologis dan Psikologis

Berbagai pandangan di atas hanya mampu menjelaskan berbagai fenomena ekonomi secara normatif, yaitu perilaku individu dari aspek luar diri individu. Namun, perdebatan menarik dalam konsep pilihan rasional adalah pada tindakan kriminal, yaitu masihkah tindakan kriminal dianggap rasional? Tindakan kriminal sudah menyangkut masalah jiwa, dan karena menyangkut kejiwaan maka perdebatan konsep rasionalitas semakin melebar dan menarik. Tidak ada yang meragukan kemampuan disiplin ilmu biologi dan psikologi dalam memaknai jiwa manusia, sehingga pemikir-pemikir di dalamnya tidak ketinggalan untuk turut memberikan argumennya.

Setiap perilaku memang terbentuk dari *self interest*, namun jika dikaitkan dengan konsep manfaat dan biaya, maka setiap tindakan kriminal akan dihadapkan dengan biaya berupa hukuman (pidana). Tidak sedikit koruptor yang hanya menikmati sebentar uang hasil korupsi, setelah itu harus mendekam di penjara. Biaya dari perilaku tersebut tentu tidak saja dalam bentuk material (mengembalikan uang yang dikorupsi), namun secara sosial akan dicemooh masyarakat luas.

Dalam konteks ekonomi kelembagaan, perilaku individu akan tergantung dari norma dan rutinitas, struktur sosial atau nilai-nilai. Pertanyaannya, norma dan nilai apa yang membungkus perilaku korupsi? Padahal perilaku itu bertentangan dengan nilai-nilai. Terdapat kemungkinan pemahaman ekonomi kelembagaan tidak memosisikan perilaku ilegal. Ada beberapa kemungkinan penyebab perilaku ilegal tersebut muncul, yaitu pelaku cenderung berpikir pragmatis, melupakan biaya (termasuk biaya sosial) yang akan ditanggungnya, sekaligus melupakan norma-norma yang berkem-

bang dalam masyarakat, sebagai pengikat kehidupannya.

Analisis akan perilaku penyimpangan ini akan sangat relevan jika dihubungkan dengan ilmu biologi, walaupun terkadang antara teori ekonomi dan teori biologi bertentangan satu sama lainnya (Vale, 2010). Bila mengacu pada pandangan Becker dan Murphy bahwa individu selalu melihat ke depan dan memutuskan secara rasional, maka bagi ilmu biologi hal itu adalah pola reaksi umum dari setiap manusia atau sifat alamiah manusia.

Bagaimana kalau dihubungkan perilaku kebiasaan meminum minuman keras, yang dianggap biasa bagi sebagian masyarakat dewasa ini? Dengan menggunakan teknologi modern, gen molekuler dan teknologi baru untuk diagnostik pencitraan telah ditemukan bahwa minuman keras melemahkan daya rem yang secara alamiah dan hal ini akan memengaruhi refleksi kognitif dari manusia akan konsekuensi dari suatu tindakan. Dengan demikian, minuman keras merusak fungsi otak dan mekanisme yang menunjukkan individu konsekuen secara penuh dari tindakannya, sehingga hasilnya memberikan penekanan pada keuntungan jangka pendek atau sesaat (Vale, 2010).

Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan candu yang bernama 'uang'? Uang merupakan topik bahasan penting dalam ilmu ekonomi. Hal yang kurang disepakati oleh psikolog adalah setiap yang berkaitan dengan uang selalu melibatkan domain ekonomi, sementara keputusan ekonomi utilitarian tidak pernah menawarkan empiris yang lengkap. Menyangkut kebiasaan, termasuk kebiasaan dan keputusan ekonomi, psikolog cenderung menganggap perilaku ekonomi di samping dipengaruhi oleh masuk akal, rasional dan pertimbangan ekonomis, juga oleh kepribadian, sikap dan keyakinan, motivasi lain, hubungan dengan keluarga, kelas sosial dan kadang-kadang delusi dan gangguan kepribadian (Schervish, 2001). Misalnya ketika seseorang memilih untuk menggunakan baju muslim atau berjil-

bab, hal itu mencerminkan kepribadian dari si pemakai. Penjelasan di atas juga bisa digunakan untuk individu yang suka berbelanja, menghamburkan banyak uang pada hal-hal terlarang, misalnya minuman keras atau obat-obatan terlarang. Perilaku tersebut menunjukkan rusak atau terganggunya kepribadian seseorang.

Uang menyulap orang untuk berbuat banyak hal, bagi kalangan muda di Cina kekuatan uang tidak saja mampu membeli status dan harta benda, tetapi juga kekuasaan dan kontrol terhadap orang lain (Durvasula and Lysonski, 2010). Sehingga keinginan untuk menjadi kaya raya dan banyak uang tidak saja karena keinginan untuk membeli banyak hal dari uang tersebut, namun orang selalu ingin, berharap bisa memerintah orang lain, mendapat pelayanan dari orang lain. Sehingga dalam konteks ini pilihan rasional akan terkait dengan psikologi kepribadian dari setiap individu, dan perilakunya akan mencerminkan kepribadiannya.

## Perspektif Islam

Orientasi perilaku ekonomi dalam Islam tidak sekadar pada dimensi dunia, namun juga mengakomodasi kepentingan akhirat sehingga semangat berekonomi lebih pada ketaatan kepada Tuhan, bekerja atas petunjuk-Nya, dan mengharap pahala dari-Nya. Karena itu kesalehan merupakan pilar perilaku ekonomi dalam Islam. Perilaku itu dibimbing oleh nilai-nilai Islam yang mengedepankan sikap altruisme dan merupakan makna dari *homo Islamicus* (Hoetoro, 2007).

*Homo Islamicus* hadir memberi koreksi akan perilaku *homo economicus* yang cenderung diarahkan oleh *self interest* dan maksimalisasi utilitas, bersifat liar tanpa pembatas sehingga dimaknai sebagai sistem liberal. Dalam konteks sosiologi, pemikir-pemikir sosiologi menyebut sifat manusia sebagai *homo sociologicus* yang beranggapan manusia tidak hanya terbangun oleh diri sendiri namun hasil interaksi sosial dalam masyarakat. Namun nilai-nilai yang mem-

bungkus interaksi itu merupakan konvensi atau kesepakatan dari entitas sosial tersebut, dan bukan semata berdasar nilai-nilai ketuhanan sehingga ada perbedaan antara satu dengan komunitas lainnya. Oleh karenanya dimensi yang dimainkan bukan hanya dimensi vertikal berbasis ketuhanan namun juga dimensi horizontal kemasyarakatan.

*Homo Islamicus* merupakan karakteristik yang membetuk perilaku rasional dalam Islam, dimana perilaku itu diarahkan oleh kebenaran hakiki (wahyu) dan bukan kebahagiaan atau nilai guna (Hoetoro, 2007). Kata *Nafs* dimaknai sebagai *self interest* dan menjadi pilar rasionalitas perilaku, yang terdiri dari *Al-Nafs Amarah*, *Al-Nafs Lawamah* dan *Al-Nafs Mutmainnah*. Adapun karakteristik dari *Al-Nafs* yaitu (Hoetoro, 2007): *Al-Nafs Amarah* memiliki karakteristik orientasi kebendaan, pemuasan kesenangan, menafikan nilai-nilai normatif, netralitas moral dan sekularisasi, sementara itu *Al-Nafs Al Lawamah* memiliki karakteristik kesadaran intuitif, pengenalan diri muncul idealisme dan terlibat dalam proses sosial, sedangkan tertinggi yaitu *Al-Nafs Al-Mutmainnah* dengan karakteristik kesadaran ketuhanan, kesempurnaan diri, berhimpitnya *das sein* dan *das sollen*.

## Metode

Artikel ini merupakan bentuk kajian literatur teoritis dengan beberapa pembahasan, yaitu *pertama*, menjelaskan konsep dasar rasionalitas. *Kedua*, perdebatan konsep pilihan rasional mulai dari neo-klasik, Keynes dan aliran lain yang bukan *mainstream*. *Ketiga*, menjelaskan makna teori biaya transaksi. *Keempat*, mendiskusikan keterkaitan antara bentuk-bentuk rasionalitas dengan biaya transaksi ilegal. *Kelima*, konsep rasionalitas yang dominan menjelaskan biaya transaksi ilegal. *Keenam*, kesimpulan.

## Hasil dan Analisis

Bila sebelumnya dibahas berbagai model pilihan rasional yang berkembang dalam pemikiran ekonomi dan dimensi ilmu lain, maka selanjutnya akan diskusikan bagaimana rasionalitas individu terbentuk ketika dihadapkan dengan biaya transaksi ilegal. Dengan kata lain rasionalitas seperti apa yang mendasari perilaku membayar biaya transaksi ilegal. Transaksi ilegal yang dimaksud dalam topik ini adalah transaksi antara pelamar CPNS dengan calo seleksi CPNS. Transaksi dalam hal ini tidak saja berbentuk penyogokan, tapi termasuk juga beberapa biaya lain seperti uang pulsa untuk calo, biaya transportasi, biaya menunggu kelulusan, dan lain-lain. Biaya ini dalam konsep ekonomi kelembagaan baru (*new institutional economics*) disebut sebagai biaya transaksi (*transaction cost*).

Dalam perkembangannya, analisis ekonomi biaya transaksi terutama dalam mengukur efisiensi desain kelembagaan semakin populer. Semakin besar biaya transaksi yang terjadi dalam kegiatan ekonomi, maka semakin tidak efisien aktivitas tersebut (Yustika, 2006). Dengan demikian, konsep biaya transaksi menjadi penting diperhatikan dalam rangka menentukan prospek usaha atau desain kelembagaan ke depannya. Dalam hal ini biaya dapat terdiri atas berbagai macam bentuk dan tidaklah sederhana yang dibayangkan. Bagi akuntan biaya dianggap sebagai *flow*. Armen Alchian menganggap biaya sebagai perubahan *equity* (modal) yang disebabkan performa (kemampuan) beberapa spesifikasi operasi dalam menyederhanakan pelayanan, dengan catatan perubahan pendapatan tidak termasuk dalam komputasi atau perhitungan dari *equity*. Dalam pehitungannya, digunakan perhitungan nilai sekarang (Shah, 2007).

Makna dari transaksi adalah pertukaran uang terhadap barang dan jasa. Pertukaran artinya memberi dan menerima untuk sesuatu yang sama nilainya dan bagi perusahaan kondisi tersebut dapat terjadi setiap hari. Jika tran-

saksi tidak dapat diukur dalam satuan uang, maka transaksi tersebut dianggap bukan transaksi ekonomi atau transaksi keuangan. Pertanyaannya, dari mana muncul biaya transaksi? Jawabannya dapat berangkat dari kritik terhadap pemikiran ekonomi neo-klasik yang menganggap tidak ada biaya transaksi (*zero transaction cost*), karena diasumsikan dalam aktivitas ekonomi, baik produsen maupun konsumen memiliki informasi sempurna, saling berkompetisi sehingga harga menjadi lebih rendah (Yustika, 2006). Kenyataan yang terjadi dapat menunjukkan sebaliknya dimana informasi cenderung asimetri dan hal ini menyebabkan pasar menjadi tidak sempurna. Usaha memahami pasar dengan pencarian informasi tentu membutuhkan biaya yang akan berpengaruh pada laba perusahaan.

Transaksi dapat terkait dengan eksternal, seperti antara penjual dan pengguna, atau transaksi untuk barang *input*, dapat juga terkait dengan internal, seperti biaya pengelolaan dan monitoring (Shah, 2007). Dengan demikian, secara umum biaya transaksi dianggap sebagai biaya *search* (mencari), *bergaining* (menawar), *monitoring* (memantau), *enforcement* (pemaksaan pertukaran), serta biaya tidak langsung yang berhubungan dengan produksi barang dan jasa (Husted dan Folger, 2004; Yustika, 2006).

Aktivitas tersebut di atas menciptakan biaya di setiap lini perusahaan, seperti misalnya dalam struktur organisasi terdapat tiga lini, yaitu desain organisasi, tingkat delegasi, dan kontrol administrasi (Shah, 2007). Menjalankan setiap lini tersebut akan dihadapkan dengan aktivitas belanja, produksi, pemasaran, periklanan, dan lainnya, sehingga dalam pasar persaingan kondisi mencari biaya yang terendah menjadi prioritas perusahaan.

Situasi dan kondisi saat memilih dan memutuskan untuk mengeluarkan biaya transaksi penting untuk dipahami. Hal ini karena persoalan yang paling mendasar dari teori pilihan rasional neo-klasik adalah tidak adanya pen-

jelasan bagaimana model situasi memilih dan menjelaskan masalah keputusan (Salehnejad, 2007). Situasi ketika memilih keputusan dan jenis masalah adalah penting dalam menentukan penyelesaian masalah pilihan tersebut. Karena itu lingkungan, nilai-nilai, keinginan, dan tujuan memiliki peran dalam setiap keputusan.

Keputusan memilih perilaku yang sama akan bisa berbeda pada waktu yang berbeda. Puluhan tahun silam, ketika dunia informasi dan globalisasi belum seterbuka saat ini, nilai-nilai moral, kebiasaan berbasis nilai-nilai kearifan masih kental dan ini menentukan perilaku individu dalam masyarakat. Pada saat itu perilaku ilegal yang bertentangan dengan nilai-nilai akan dianggap sebagai penyimpangan yang kemudian berpotensi mendapat pertentangan dari masyarakat. Semakin lama, perilaku penyimpangan menjadi semakin biasa dilakukan, seiring dengan nilai atau norma yang semakin luntur.

Biaya transaksi ilegal yang dimaksud dalam tulisan ini adalah biaya untuk meloloskan seseorang menjadi CPNS, yang kemudian melalui proses tertentu akan diangkat menjadi PNS. Mereka yang bertransaksi adalah pelamar CPNS satu sisi dan calo CPNS yang dianggap mampu meluluskan individu menjadi CPNS. Padahal kita mengetahui bahwa menjadi pegawai negeri tidak dipungut biaya apa pun, namun karena keterbatasan informasi atau keinginan yang berlebihan untuk menjadi pegawai negeri, maka muncul penyedia jasa yang biasa disebut calo, yang dianggap mampu meloloskan pelamar di tengah ketatnya persaingan masuk menjadi CPNS.

Ada beberapa asumsi umum sebelum mendiskusikan konsep rasionalitas dalam kaitannya dengan fenomena membayar biaya transaksi ilegal masuk menjadi PNS, di mana asumsi itu harusnya menjadi dasar rasionalitas berpikir individu. *Pertama*, tidak ada jaminan seratus persen individu yang membayar transaksi itu lulus menjadi CPNS; *kedua*, kemungkinan hilangnya uang yang diserahkan individu rela-

tif besar ketika individu itu tidak lulus pegawai negeri; *ketiga*, ada banyak penipuan yang sering kali terungkap di media masa; dan *keempat*, membayar biaya transaksi ilegal bertentangan dengan norma umum yang berkembang dalam masyarakat.

### **Self Interest dan Maksimalisasi Utilitas**

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa dalam perspektif ekonomi neoklasik manusia akan melakukan kalkulasi manfaat dan biaya sebelum memutuskan melakukan aktivitas. Dalam teori kriminalitas dikatakan masyarakat sebagai *human nature* yang melakukan prediksi antara kesenangan (*pleasure*) dan menghindari rasa sakit (*pain*) sehingga dalam aksinya ia mengatur bagaimana melakukan kalkulasi strategis untuk menggapai utilitas yang maksimal (Scott, 2000). Ada beberapa sifat rasionalitas neo-klasik yang perlu digarisbawahi yaitu *pertama*, maksimalisasi utilitas; *kedua*, bertujuan *self interest* serta terisolasi dari hubungan dengan masyarakat dan sosial (Yilmaz, 2007); *ketiga*, kalkulasi manfaat dan biaya; dan *keempat*, setiap manusia bersifat rasional dan memahaminya yang terbaik bagi dirinya.

Sebagian masyarakat menganggap biaya transaksi ilegal itu sebagai biaya masuk kerja, yang dalam tempo tertentu akan kembali dengan pendapatan (gaji) yang lebih menjanjikan setelah menjadi PNS. Dasar pemikiran dalam membayar itu adalah biaya yang dikeluarkan akan lebih kecil dari keuntungan yang diperoleh. Seorang pegawai negeri dengan penghasilan rutin per bulan dan juga kemampuan memperoleh kredit perbankan, serta jaminan hari tua adalah bentuk pendukung rasionalitas berpikir itu. Pemahaman ini tentu saja mencerminkan sifat *self interest* demi memaksimalkan kepuasan menjadi pegawai negeri dengan mengabaikan kepentingan yang lebih luas, yaitu persaingan sehat, penjarangan berdasarkan kualitas dan bukan berdasarkan uang transaksi.

Dari sisi lain, pelamar dihadapkan pada ketidakpastian akan kelulusan menjadi CPNS dengan membayar biaya transaksi. Ada banyak penipuan yang dilakukan oleh calo seleksi PNS, padahal dalam memenuhi kebutuhan ini individu menjual berbagai aset. Rasionalitas berpikir seperti ini didasarkan pada konsep probabilitas lulus dan tidak lulus yang didapat dari pengalaman sebelumnya dengan uang transaksi. Ditambah lagi dengan bayang-bayang aturan hukum yang menganggap transaksi ilegal sebagai pelanggaran hukum, serta aturan kelembagaan yang menganggap perilaku ilegal ini merupakan perbuatan melanggar norma dan nilai dalam masyarakat.

Sehingga dalam konteks ini proses terbentuknya transaksi ilegal ini dilakukan dengan kalkulasi manfaat dan biaya dalam kondisi tidak pasti (*uncertainty*). Harapan yang belum tentu tercapai di tengah berbagai risiko ketidakpastian itu seperti hilangnya uang yang digunakan untuk transaksi, karena ditipu pelaku (calo) atau kemungkinan ketidaklulusan.

### **Transaksi Ilegal Sebagai Kebiasaan atau Rutinitas?**

Karakteristik utama konsep pemikiran Veblen adalah menolak rasionalitas kalkulasi versi neoklasik (Ylmaz, 2007). Rasionalitas ekonomi kelembagaan lama (*old institutional economics*) yang dipelopori Veblen dan murid-muridnya adalah bahwa perilaku individu berdasar kebiasaan dan rutinitas. Naluri adalah komponen kunci dari teori Veblen tentang evolusi kelembagaan dan budaya, dimana naluri secara langsung didasarkan pada kebiasaan dan rutinitas untuk menggantikan kalkulasi tindakan (Cordes, 2005). Dalam konteks transaksi ilegal masuk PNS konsep ini kuranglah tepat. Mengingat *pertama*, penyogokan bukanlah kebiasaan atau rutinitas dari lingkungan, sehingga individu tidak dalam rangka mengejar kebiasaan dalam lingkungannya; *kedua*, masyarakat yang beragama dan berbudaya masih menganggap penyogokan adalah tabu walaupun se-

bagian permisif dengan perilaku itu. Karena itu pandangan Veblen akan menjadi benar bila membayar biaya transaksi masuk PNS telah menjadi budaya dan kebiasaan, dan masyarakat cenderung permisif akan itu. Terbukti banyaknya ekspos media massa atas laporan individu yang merasa tertipu oleh calo. Hal ini memberikan kita pemahaman bahwa tindakan ilegal yang dilakukan tidak lagi berdasar tata aturan yang berkembang dalam lingkungannya ketika perilaku itu semakin dianggap biasa oleh masyarakat.

Persoalan yang paling substansial dari pemikiran Veblen dan penerusnya dalam hal ini bahwa kebiasaan dan rutinitas bukan sesuatu yang statis melainkan dinamis, sehingga sulit menentukan kapan kebiasaan dan rutinitas memiliki batasan dan memengaruhi rasional perilaku individu. Perilaku ilegal bukanlah kebiasaan dan rutinitas masyarakat, namun jika perilaku itu tetap dilakukan, apakah selanjutnya dapat dikatakan telah terjadi perubahan kebiasaan dan rutinitas? Jawabannya mungkin saja karena kebiasaan dan rutinitas dapat berevolusi sejalan dengan pikiran dan pemahaman manusia yang menjalankannya.

### **Kekuatan *Direct Acquaintance***

Menurut Keynes, manusia rasional akan mempertimbangkan pengalaman, pemahaman, dan persepsi. Dalam konteks pembayaran transaksi ilegal seleksi masuk PNS mengindikasikan bahwa apa yang dilakukan oleh individu sebagian berdasarkan pengalaman dari peserta tes pegawai negeri sebelumnya yang kebanyakan sukses atau lulus dengan membayar biaya tersebut. Pengalaman juga menentukan kepada siapa yang layak, atau dinilai efektif, untuk dilakukan transaksi atau diserahkan uang transaksi ilegal sehingga lulus ujian, berapa uang yang diserahkan dan bagaimana bentuk pengembalian uang bila ternyata tidak lulus.

Karena itu pengalaman menjadi penentu rasionalitas dalam mengeluarkan uang untuk biaya transaksi. Namun masalahnya adalah bah-

wa pengalaman pula yang menunjukkan bahwa ada banyak orang tidak lulus dan banyak penipuan yang terungkap. Apakah terjadi timbang-menimbang, tarik-menarik pengalaman lulus dan tidak lulus dengan membayar biaya transaksi ilegal dalam benak individu? Apakah individu menghitung persentase atau probabilitas pengalaman lulus dan tidak lulus, sehingga apa pun keputusan akhirnya merupakan hasil perilaku timbang-menimbang tersebut? Ini akan menjadi kajian lapangan yang menarik.

Satu hal yang perlu diperhatikan adalah, pada umumnya orang mengeluarkan biaya transaksi tidak didasari pemahaman yang mendalam, kenapa jumlah biaya transaksi itu sejumlah tertentu, siapa yang menciptakan nilai pasaran tersebut dan seberapa pasti kelulusan dapat diraih. Sehingga dapat dikatakan bahwa perilaku tersebut didasari pemahaman yang relatif terbatas, hal ini sejalan dengan pembahasan mengenai keterbatasan kognitif versi Herbert Simon.

Demikian pula dengan persepsi yang menyangkut keyakinan dan cara pandang individu akan perilakunya. Individu biasanya mempersepsikan bahwa ia tidak mungkin lulus tanpa membayar biaya transaksi dan bahwa tes tanpa biaya transaksi adalah perilaku sia-sia yang membuatnya sulit untuk sukses. Ketika keinginan ini muncul secara kuat dalam diri individu, maka ia tidak akan mempersoalkan bagaimana persepsi orang akan perilaku ilegal ini, apalagi perilaku itu dilakukan secara kolektif oleh individu lain dan selanjutnya menjadi biasa di tengah-tengah masyarakat. Melihat kondisi di lapangan, walaupun membayar biaya transaksi pada umumnya dianggap sebagai perilaku ilegal, tetapi eksistensinya semakin menjadi biasa, di mana selama ini yang melakukan pembayaran dianggap sebagai korban penipuan sehingga sering kali melapor ke polisi bila ternyata dirinya tidak lulus seleksi, padahal yang dianggap korban ini sesungguhnya bagian dari pihak yang bersepakat dalam membentuk biaya transaksi tersebut.

### ***Bounded Rationality***

*Bounded Rationality* menekankan pada dua hal yaitu keterbatasan kognitif karena informasi yang tidak sempurna dan struktur lingkungan. Individu memiliki kemampuan terbatas untuk mengolah berbagai informasi yang tersedia, misalnya ketika kesepakatan biaya transaksi ditentukan, pelamar tidak banyak memahami bagaimana logika terbentuknya biaya tersebut. Pelamar pada umumnya hanya paham bahwa uang tersebut akan diserahkan pada oknum tertentu sebagai penentu kelulusan CPNS, tetapi tidak secara detail dipahami siapa oknum itu dan apa peran atau kedudukannya. Ia hanya mengenal orang suruhan yang bermain di lapangan dengan mengatasnamakan oknum tadi, dan gambaran akan oknum sebatas yang diceritakan orang suruhan di lapangan, dan kebenaran dari cerita itu masih dipertanyakan. Bagaimana berharap mengalkulasi lulus atau tidak, serta besar kecilnya biaya transaksi, sementara informasi yang tersedia adalah terbatas.

Karena itu, rasionalitas berperilaku dibatasi oleh keterbatasan informasi, kemampuan pengolahan informasi dan juga waktu untuk mengolah informasi. Oleh karena keterbatasan itu, Simon ingin menghindari konsep maksimalisasi kalkulasi dan optimalisasi, dan menggantikannya dengan konsep individu sebagai *developer* dan pemodifikasi kebiasaan, aturan keputusan, dan heuristik, sehingga tanpa sengaja ia meninggalkan gagasan rasionalitas (Rutherford, 1994).

Kebiasaan dan pengalaman menjadi sandaran dan informasi individu. Jika misalkan bertransaksi dengan oknum tertentu diketahui tinggi probabilitas suksesnya atau dengan mengeluarkan biaya sebesar tertentu menyebabkan sukses, maka hal tersebut merupakan informasi terbatas yang dipegang individu yang akan menjadi dasar rasionalitas bagi perilakunya. Dengan demikian seseorang tetap mengalkulasi berbagai peluang tersebut namun secara terbatas.

Simon juga berpendapat struktur lingkungan merupakan faktor yang penting. Perilaku ilegal akan semakin biasa dilakukan ketika lingkungan semakin permisif akan tindakan itu. Terlebih ketika asumsi bahwa tanpa uang seseorang tidak mungkin lulus, maka mau tidak mau mengeluarkan biaya transaksi menjadi persepsi kolektif lingkungan. Dengan menjadi pemahaman kolektif maka tanpa pikir panjang perilaku itu akan dilakukan individu. Pembeneran oleh lingkungan akan menjadi tindakan otomatis individu dalam lingkungan itu, tanpa dibebankan oleh kalkulasi manfaat dan biaya. Kekuatan lingkungan terletak pada norma atau nilai bersama, yang akan menjadi aksi kolektif dalam masyarakat sehingga membatasi perilaku individu. Dengan demikian, jika norma dan nilai bersama terpinggirkan, maka lingkungan tidak lagi jadi penentu tindakan individu.

### Rasionalitas Sosiologis

Apa yang diungkap sosiolog mencerminkan sifat dasar perilaku individu di mana unsur rasionalitas terdiri dari: kepandaian yang akan menentukan keputusan yang terbaik; kendala yang membatasi keinginan dan pilihan sehingga mencari alternatif pilihan lain; harapan menjadi pendorong berperilaku; evaluasi menciptakan kualitas perilaku; motivasi pemberi semangat perilaku; dan memaknai menjadi dasar pertimbangan perilaku. Namun bila tanpa dasar dan pedoman, maka perilaku ilegal pun akan menjadi rasional. Seorang penjahat pun memiliki motivasi yang kuat dalam berperilaku, namun tanpa pijakan norma atau nilai yang berkembang dalam masyarakat. Lebih jauh lagi, nilai dan norma belumlah cukup, karena itu derajat keimanan perilaku adalah puncak dari rasionalitas itu. Keimanan yang memotivasi individu untuk berperilaku dan memiliki motivasi kuat, dan keimanan pula yang membatasi orang untuk berperilaku, dengan demikian keimanan akan menggantikan manfaat dan biaya, kebiasaan dan rutinitas, serta struktur

lingkungan.

### Rasionalitas Psikologis

Perilaku individu adakalanya tidak rasional, dan ketidakrasionalan itu biasanya terkait dengan kepribadian individu pelaku. Kepribadian seperti sering tersinggung karena dianggap pengangguran, dilecehkan karena bukan PNS menjadi salah satu pendorong individu melakukan segala hal untuk dapat menjadi PNS, salah satunya dengan membayar biaya transaksi. Jika dipahami lebih jauh, individu sebenarnya memiliki informasi memadai bahwa ada banyak penipuan makelar seleksi PNS yang diungkap di media massa. Namun karena keinginan kuat menjadi PNS, informasi tersebut menjadi terabaikan. Di sinilah pentingnya aspek kepribadian (psikologi) dalam menggerakkan rasionalitas individu.

### *Faith Degree of Rationality*

Keterbatasan dari berbagai logika rasionalitas yang dibangun pemikir ekonomi dan sosiologi cenderung mengabaikan unsur keimanan (atau ketakwaan) dari setiap agama yang diyakini agen ekonomi. Dalam konteks ini, derajat keimanan akan menentukan rasionalitas perilaku dan pilihan individu, sehingga dapat disebut sebagai rasionalitas derajat keimanan atau *faith degree of rationality*. Semakin tinggi derajat keimanan, semakin mengarahkan perilaku individu akan agama dan keyakinannya itu, sehingga perilaku rasional akan sejalan dengan nilai-nilai yang digariskan agama pelaku.

Hampir setiap orang memiliki agama dan keyakinan, namun nilai-nilai yang terbangun dalam agama tidak serta merta menjadi penuntun perilaku rasional individu. Orang Islam mengharamkan minuman keras, berjudi atau mengundi nasib, namun tidak sedikit di antara mereka melakukannya. Penyebabnya karena derajat keimanan pelaku yang cenderung rendah dalam Islam dianggap *Al-Nafs Amarah*. Karena itu nilai-nilai, norma, atau kebiasaan

tidak dapat menjelaskan logika rasionalitas secara memuaskan. Artinya walaupun nilai-nilai itu ada, tidak secara otomatis individu memantuhkannya dan menjadi pengarah perilaku individu.

Antara keimanan dan maksimalisasi yang dilakukan individu dengan kerangka manfaat dan biaya akan saling menggantikan (substitusi). Ketika perilaku ilegal dilakukan, sebenarnya individu tengah memaksimalkan atau mencari kesenangan pribadi dengan melakukan kalkulasi keuntungan dan mengabaikan dasar-dasar keimanan, yang mencerminkan derajat keimanan yang relatif rendah. Ketika kedalaman derajat keimanan membentuk dan menguasai logika perilaku seseorang, maka ia tidak akan melakukan perilaku yang cenderung merugikan orang lain, membatasi persaingan sehat atau mendzolimi orang lain, sebesar apa pun benefit yang akan diperolehnya. Dengan demikian, bentuk rasionalitas yang tepat dari terbentuknya biaya transaksi ilegal adalah kedalaman derajat keimanan, bukan karena manfaat dan biaya, atau karena rutinitas, kebiasaan dan norma-norma, serta struktur lingkungan. Pada satu sisi hal ini memberikan pembenaran bagi pemikiran Keynes bahwa pemahaman dan persepsi individu membentuk rasionalitas perilaku. Namun sayangnya pemahaman dan persepsi bagi Keynes tidak merujuk pada keimanan akan keyakinan atau agama individu tetapi lebih pada objek pembentuk perilaku dan hal-hal pendukung objek itu secara kasat mata, sehingga pemikiran Keynes dan tokoh-tokoh lain cenderung prematur dalam hal ini.

Tabel 1 merangkum berbagai pemikiran teori rasional dan hubungannya dengan membayar biaya transaksi seleksi PNS.

## Simpulan

Paper ini merupakan kajian teoritis yang digunakan untuk memahami fenomena perilaku membayar biaya transaksi seleksi CPNS yang terjadi di Indonesia. Teori yang digunakan ada-

lah teori rasionalitas atau pilihan rasional, di mana eksistensinya masih menimbulkan perdebatan akan faktor apa pembentuk rasionalitas perilaku individu. Dasar teori rasionalitas dibangun lewat pemikiran ekonomi neo-klasik, juga pemikir lain yang juga berkontribusi dalam konsep rasionalitas misalnya John M. Keynes, *Old Institutional Economics* (OIE) yang dipelopori Thorstein Veblen, *Bounded Rationality* oleh Herbert Simon yang merupakan pemikir *New Institutional Economics* (NIE), ekonomi sosiologi, ekonomi psikologi, dan ekonomi Islam.

Masing-masing pemikiran memiliki dasar argumen yang kuat sekaligus keterbatasan dalam menjelaskan fenomena membayar biaya transaksi seleksi CPNS. Namun secara umum perdebatan yang terjadi seputar pemahaman berikut: *pertama*, kepentingan pribadi (*self interest*) atau kepentingan sosial (*social interest*); *kedua*, berdasar kalkulasi manfaat dan biaya atau berdasarkan kebiasaan dan rutinitas; *ketiga*, berdasar material atau non-material; dan *keempat*, berdasar akal sehat atau bukan akal sehat (gangguan kepribadian).

Rasionalitas neo-klasik dalam praktik membayar biaya transaksi seleksi CPNS cenderung lebih mampu menjelaskan dibandingkan konsep rasionalitas lain. Mengingat dalam benak pelaku ketika membayar tidak akan mempedulikan orang lain, yang penting lulus menjadi pegawai negeri. Ini adalah sifat *self interest* (*Al-Nafs Amarah*) dalam memaksimalkan kepuasan pribadi. Kemudian dalam praktiknya pelaku sudah melakukan perhitungan manfaat dan biaya, dan jumlah uang yang dibayarkan adalah hasil kalkulasi tersebut. Persepsi, pemahaman, dan pengalaman individu pelaku berperan dalam praktik ilegal ini sehingga membenarkan sebagian apa yang diungkap Keynes, ekonomi sosiologi dan psikologi. Namun demikian, persepsi dan pemahaman harusnya juga terbentuk dari pengalaman banyaknya kasus penipuan yang merugikan pelamar. Jawaban yang paling tepat untuk menjelaskan hal ini

adalah konsep probabilitas, yaitu berapa besar kemungkinan lulus atau tidak lulus dengan membayar transaksi ilegal dari pengalaman sebelumnya.

Perilaku membayar transaksi ilegal juga dipastikan bukanlah kebiasaan dan rutinitas seperti pemahaman Veblen dan OIE, informasi juga tidak lagi dianggap terbatas seperti ungkapan Herbert Simon dalam konsep *Bounded Rationality*-nya. Dengan banyaknya terungkap media dapat dianggap masyarakat semakin permisif dengan transaksi ilegal ini, meninggalkan pertanyaan menarik untuk kajian lapangan apakah telah terjadi perubahan kelembagaan (norma, nilai-nilai, dan keyakinan) atau yang dikenal *institutional change* dalam ilmu ekonomi kelembagaan.

## Daftar Pustaka

- [1] Biggart, N. W. (2002). *Readings in Economic Sociology*. Malden, Mass.: Blackwell Publishers.
- [2] Cordes, C. (2005). Veblen's "Instinct of Workmanship," Its Cognitive Foundations, and Some Implications for Economic Theory. *Journal of Economic Issues*, XXXIX (1), 1–20.
- [3] Durvasula, S. & Lysonski, S. (2010). Money, Money, Money – How do Attitudes Toward Money Impact Vanity and Materialism? The Case of Young Chinese Consumers. *Journal of Consumer Marketing*, 27 (2), 169–179.
- [4] Foley, D. K. (2004). Rationality and Ideology in Economics. *Social Research*, 71 (2), 329–342.
- [5] Folmer, H. (2009). Why Sociology is Better Conditioned to Explain Economic Behaviour than Economics. *Kyklos*, 62 (2), 258–274.
- [6] Gagnon, M. (2007). Capital, Power and Knowledge According to Thorstein Veblen: Reinterpreting the Knowledge-Based Economy. *Journal of Economic Issues*, XLI (2), 593–600.
- [7] Gerrard, B. (1993). *The Economics of Rationality*. London & New York: Routledge.
- [8] Gigerenzer, G., & Selten, R. (2001). Rethinking Rationality. In G. Gigerenzer & R. Selten (Eds.), *Bounded Rationality: The Adaptive Toolbox*. Cambridge, MA: MIT Press.
- [9] Gilboa, I. (2010). *Rational Choice*. London: MIT Press.
- [10] Graafland, J. J. (2007). *Economics, Ethics and the Market: Introduction and Applications*. London: Routledge.
- [11] Hey, J. D. (1993). Rationality Is As Rationality Does. In B. Gerrard (Ed.), *The Economics of Rationality*. London & New York: Routledge.
- [12] Hodgson, G. M. (2010). Choice, Habit and Evolution. *Journal of Evolutionary Economics*, 20, (1), 1–18.
- [13] Hoetoro, A. (2007). *Ekonomi Islam: Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi*. Malang: Bayumedia Publishing FE UNIBRAW.
- [14] Husted, B. W. & Folger, R. (2004). Fairness and Transaction Costs: The Contribution of Organizational Justice Theory to an Integrative Model of Economic Organization. *Organization Science*, 15 (6), 719–729.
- [15] Kasper, W. & Streit, M. E. (1998). *Institutional Economics: Social Order and Public Policy*. Cheltenham, U.K. & Northampton, Mass.: Edward Elgar.
- [16] Kompas.com. (2012, Januari 17). *Masuk PNS Perlu Rp 60 Juta-Rp 100 Juta*. <http://nasional.kompas.com/read/2012/01/17/1612146/Masuk.PNS.Perlu.Rp.60.Juta-Rp.100.Juta>. (Accessed November 15, 2012).
- [17] Kyriacou, A. P. (2005). Rationality, Ethnicity and Institutions: a Survey of Issues and Results. *Journal of Economic Surveys*, 19 (1), 23–42.
- [18] Landa, J. T. & Wang, X. T. (2001). Bounded Rationality of Economic Man: Decision Making Under Ecological, Social, and Institutional Constraints. *Journal of Bioeconomics*, 3 (2–3), 217–235.
- [19] Milonakis, D. & Fine, B. (2009). *From Political Economy to Economics: Method, the Social and the Historical in the Evolution of Economic Theory*. London & New York: Routledge.
- [20] Redmond, W. H. (2004). On Institutional Rationality. *Journal of Economic Issues*, XXXVIII (1), 173–188.
- [21] Rutherford, D. (1995). *Routledge Dictionary of Economics*. London and New York: Routledge.
- [22] Rutherford, M. (1994). *Institutions in Economics: the Old and the New Institutionalism*. Cambridge & New York: Cambridge University Press.
- [23] Salehnejad, R. (2007). *Rationality, Bounded Rationality and Microfoundations: Foundations of Theoretical Economics*. London & New York: Palgrave Macmillan.
- [24] Schervish, P. G. (2001). Review: "The Psychology of Money." *Contemporary Sociology*, 30 (2), 166–167.
- [25] Schmid, A. A. (2004). *Conflict and Cooperation: Institutional and Behavioral Economics*. Oxford, U.K.: Blackwell.
- [26] Scott, J. (2000). Rational Choice Theory. In G. Browning, A. Halcli, & F. Webster (Eds.), *Understanding Contemporary Society: Theories of the Present*. New York: Sage Publications.

- [27] Selten, R. (2001). What Is Bounded Rationality? In G. Gigerenzer & R. Selten (Eds.), *Bounded Rationality: The Adaptive Toolbox*. Cambridge, MA: MIT Press.
- [28] Shah, M. (2007). *Analysis of Transaction Cost*. India: Sunrice Publisher & Distributors.
- [29] Swedberg, R. (2003). *Principles of Economic Sociology*. Princeton & Oxford: Princeton University Press.
- [30] Tribun Jateng. (2011, Maret 1). *Korban Dugaan Penipuan Calo CPNS Perhatikan Dokumen*. <http://jateng.tribunnews.com/2011/03/01/korban-dugaan-penipuan-calo-cpns-perhatikan-dokumen>. (Accessed November 15, 2012).
- [31] Tribun Medan. (2012, Juni 25). *Hukuman Elizabeth Penipu CPNS Menjadi 40 Bulan Penjara*. <http://medan.tribunnews.com/2012/06/25/hukuman-elizabeth-penipu-cpns-menjadi-40-bulan-penjara>. (Accessed November 15, 2012).
- [32] Vale, P. H. (2010). Addiction and Rational Choice Theory. *International Journal of Consumer Studies*, 34 (1), 38–45.
- [33] Vanberg, V. J. (2004). The Rationality Postulate in Economics: Its Ambiguity, Its Deficiency and Its Evolutionary Alternative. *Journal of Economic Methodology*, 11 (1), 1–29.
- [34] Wartiovaara, M. (2011). Rationality, REMM, and Individual Value Creation. *Journal of Business Ethics*, 98 (4), 641–648.
- [35] Winslow, T. (1993). Keynes on Rationality. In B. Gerrard (Ed.), *The Economics of Rationality*. London & New York: Routledge.
- [36] Ylmaz, F. (2007). Veblen and the Problem of Rationality. *Journal of Economic Issues*, XLI (3), 841–862.
- [37] Yustika, A. E. (2006). *Ekonomi Kelembagaan: Definisi, Teori dan Strategi*. Malang: Bayumedia Publishing.

**Tabel 1:** Konsep Rasionalitas dalam Menjelaskan Transaksi Ilegal CPNS

Teori Rasionalitas	Pembentuk Rasionalitas	Mendukung Fenomena	Bertentangan dengan Fenomena
Neo-klasik	Sifat <i>homoeconomicus</i> : <i>self interest</i> , maksimalisasi utilitas dan kalkulasi manfaat-biaya	Membayar transaksi sebagai sifat <i>self interest</i> , maksimalisasi utilitas, melakukan kalkulasi manfaat-biaya, yaitu bila lulus PNS uang yang dibayarkan akan kembali dalam waktu singkat	Kalkulasi manfaat-biaya dihadapkan pada kondisi ketidakpastian ( <i>uncertainty</i> ) lulus atau tidak lulus, dan kejujuran calo pun juga dipertanyakan
John M. Keynes	<i>Direct Acquaitance</i> (pengalaman langsung) yang terdiri dari tiga elemen: pengalaman, pemahaman, dan persepsi	Membayar karena pengalaman kelulusan pelamar sebelumnya dengan perantara calo seleksi PNS, adanya pemahaman dan persepsi pentingnya membayar transaksi, kalau tidak bayar sia-sia (tidak akan lulus)	Pengalaman lain menunjukkan dapat terjadi calon tidak lulus walaupun sudah membayar biaya transaksi, yang dapat terjadi karena penipuan oleh calo seleksi CPNS. Dilain pihak, ada calon yang lulus tanpa membayar biaya transaksi (lulus mumi)
OIE	Kalkulasi manfaat-biaya neo klasik digantikan dengan kebiasaan ( <i>habits</i> ) dan rutinitas ( <i>routines</i> ), unsur-unsur kelembagaan: nilai-nilai, norma, dan regulasi	Biaya transaksi ilegal pada umumnya tidak memperhitungkan jumlah uang yang dibayarkan, karena keinginan berlebih untuk lulus. Bisa saja terjadi perubahan kebiasaan dan rutinitas dalam masyarakat di era globalisasi	Transaksi ilegal seleksi PNS bukanlah kebiasaan dan rutinitas masyarakat umumnya, jauh dari norma dan nilai-nilai sosial
<i>Bounded Rationality</i> (NIE)	Keterbatasan kognitif mengelola informasi dan struktur lingkungan, maksimalisasi digantikan oleh satisfaksi	Membayar karena keterbatasan informasi, struktur lingkungan mendukung dan kepuasan yang satisfaksi, bukan maksimal (utuh) karena harus mengorbankan harta	Informasi sudah semakin murah, dan semakin terbuka. Calon hanya memerlukan sedikit usaha untuk menelusuri informasi tersebut. Struktur lingkungan pada umumnya menolak transaksi ilegal
Ekonomi Sosiologi	Terbentuk dari kepandaian (akal), kendala, harapan, evaluasi, motivasi, dan makna	Transaksi ilegal dibentuk oleh harapan untuk lulus seleksi PNS, karena kendala kapasitas, persaingan ketat	Akal sehat direduksi oleh harapan dan persepsi akan pentingnya membayar calo. Kepandaian tergantikan oleh harapan dan sedikit kepastian untuk lulus CPNS dengan cara instan
Ekonomi Psikologi	Di samping dipengaruhi oleh masuk akal dan pertimbangan ekonomis juga oleh kepribadian, sikap dan keyakinan, motivasi, hubungan dengan keluarga, teman pergaulan, kelas sosial, dan dapat juga berupa delusi dan gangguan kepribadian	Membayar transaksi ilegal akan mencerminkan kepribadian individualistis ( <i>self interest</i> ) dan mengabaikan kepentingan lain secara umum (yang tidak memiliki uang transaksi). Adanya persepsi, keyakinan, dan sikap masyarakat terhadap status sosial PNS sehingga pelaku sekuat tenaga untuk lulus CPNS	Transaksi ilegal ini muncul bukan hanya karena keinginan individu, tetapi juga karena permissifnya lingkungan sosial, sehingga banyaknya pihak yang melakukan transaksi sudah dianggap biasa
Rasionalitas Islam	<i>Homo Islamicus</i> adalah rasional Islam, perilaku itu diarahkan oleh kebenaran hakiki (wahyu) bukan kebahagiaan atau nilai guna. Ada tiga level perilaku manusia <i>Al-Nafs Amarah</i> ( <i>self interest</i> , kebendaan), <i>Al-Nafs Lawamah</i> (sosialitas), dan <i>Al-Nafs Mutmainnah</i> (kesadaran akan ketuhanan)	Membayar biaya transaksi ilegal menunjukkan sifat <i>Al-Nafs Amarah</i> . Baik buruk perilaku tergantung derajat keimanan individu	Bagaimana individu dapat berperilaku ilegal yang nyata-nyata tidak sesuai dengan nilai-nilai agama yang dianut pelaku